

Kemenham

Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, sebelumnya kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan di KSP. "Penyelesaian dilakukan dengan yudisial maupun nonyudisial," ungkapnya

Saat aktif di KSP, Presiden Jokowi waktu itu mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat dan akan memulihkan. "Namun belum banyak yang bisa dilakukan karena baru berjalan 6 bulan sudah ada transisi pemerintahan, sehingga keberadaan Kemenham penting di era Presiden Prabowo," jelas Mugiyanto yang menjadi korban pelanggaran HAM saat aktivis di ge-

rakan mahasiswa dan kini sudah mendapat pemulihan. Kunjungan ke PT BP KR ini sekaligus untuk menjajaki kerja sama dengan media dalam edukasi pene-gakan HAM. "Berbeda dengan Kom-nas HAM, kinerja Kemenham di level kebijakan seperti misalnya peningkat-an kapasitas aparat sipil negara men-genai HAM, juga edukasi ke masya-rakat, desa dan lainnya," papar Mugiyanto yang telah bertemu langsung dengan keluarga korban pelanggaran HAM dan bisa merasakan penderitaan mereka Kunjungan Wamenham disambut

Dirut PT BP KR Drs HM Idham Samawi, Komisaris Utama Imam Satri-yadi SH, Direktur Keuangan Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc, Di-rektur Produksi Baskoro Jati Prabowo S Sos, Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis Yoeke Indra Agung Laksana SE. Kemudian Direktur Umum Ir Dyah Sardjuningrum Sitawati, Direktur Pemasaran Fajar Kusumawardhani SE, Pemimpin Redaksi Octo Lampito dan jajarannya. "Sebagai media yang lahir 40 hari setelah Kemerdekaan RI (27 Sep-tember 1945) SKH Kedaulatan Rak-yat selalu membawa aspirasi rakyat,

Sambungan hal 1

hukum semata bisnis," tegas Idham Samawi Idham mengungkapkan Presiden-presiden RI mengapresiasi dan mem-perhitungkan KR sebagai bacaan un-tuk menyerap aspirasi rakyat, kare-nanya wajib berada di meja Presiden. "Setiap Ulang Tahun KR, para Presi-den RI memberikan ucapan dan ha-rapan dengan tulisan tangan lang-sung," ungkapnya. Sebagai media yang besar dan eks-sis hingga saat ini dengan kepercaya-an rakyat, PT BP KR siap bersinergi untuk memberikan sosialisasi, edu-kasi kebijakan pemerintah. (Vin)-d

MILAD KE-18 BANK BPD DIY SYARIAH
Perluas Sinergi, Berkembang Semakin Baik



KR-Fira Nurfiani

Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad memotong tum-peng menandai Milad ke-18 Bank BPD DIY Syariah.

YOGYA (KR) - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank BPD DIY menjadikan milad ke-18 pada 19 Februari 2025 sebagai momentum memperluas sinergi dan kolaborasi dengan para mitra untuk berkembang semakin baik. Bank BPD DIY Syariah juga memperkuat inovasi produk dan layanan untuk mendo-rong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal itu, Bank BPD DIY Syariah terus meningkatkan kerja sama de-ngan berbagai lembaga, sekolah/madrasah, pondok pe-santren, Pemerintah Daerah, UMKM dan berbagai mitra strategis lainnya.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengata-kan, sebagai bagian dari Bank BPD DIY yang melayani produk syariah, UUS Bank BPD DIY atau Bank BPD DIY Syariah telah bertumbuh dengan baik selama beroperasi di DIY sejak 19 Februari 2007 lalu. Tidak sekadar mendapatkan penilaian UUS yang sehat dari OJK, Bank BPD DIY Syariah men-catatkan capaian kinerja yang baik sepanjang 2024. Aset yang berhasil dibukukan Rp 2,1 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun Rp 1,012 triliun, pembiayaan yang telah dis-alurkan Rp 1,106 triliun, dan laba operasional Rp 97,9 miliar. "Alhamdulillah Bank BPD DIY termasuk UUS yang tumbuh di atas rata-rata industri keuangan sehingga kita patut bersyukur Bank BPD DIY Syariah telah hadir selama 18 tahun. Meski masih banyak hal yang harus kita kerjakan, kami ingin UUS Bank BPD DIY mempunyai manfaat yang lebih besar dan betul-betul mendapatkan tempat di hati masyarakat, uta-manya pelaku UMKM di DIY," tutur Santoso Rohmad dalam Peringatan Milad ke-18 Bank BPD DIY Syariah di Kantor Bank BPD DIY Syariah, Jalan Magelang Km 5,5 Yogyakarta, Rabu (19/2). (Ira)-f

Hasto

Sambungan hal 1

pupuk bagi demokrasi ini, akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-be-narnya tanpa pandang pilih," tuturnya.

Hasto menegaskan bahwa kehadirannya di KPK adalah bentuk penghormatan terha-dap hukum meskipun ada ke-pentingan politik yang mem-bayangi kasusnya. Hasto mengingatkan bahwa dirinya bukan pejabat negara, dan ti-dak ada kerugian negara da-lam kasus dipersangkakan terhadapnya.

Terpisah, Menteri Koordina-tor Bidang Hukum, HAM, Imi-grasi, dan Pemasarakatan Yusril Ilha Mahendra meng-aku menghormati keputus-an yang diambil oleh KPK ter-kait penahanan Hasto Kris-tiyanto. "Kita hormati keputus-an yang diambil oleh KPK," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Yusril mengaku dirinya ti-dak mengetahui secara detail mengenai kabar terbaru ten-tang penahanan Hasto terse-but. Namun ditekankan, pe-merintah tidak dapat mengin-tervensi proses hukum yang dilakukan oleh KPK. KPK se-bagai lembaga negara pene-gak hukum yang independen dan memiliki kewenangan untuk menahan seseorang maupun mencegah seseo-rang bepergian ke luar negeri.

Sedangkan Menteri Hu-kum Supratman Andi Agtas memilih tidak memberikan komentar terkait dengan ka-sus hukum yang melibatkan Hasto di KPK. (Ant/Has)-f

TMMD BENTUK SINERGI NYATA TNI
Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Membangun Desa



KR-Istimewa

Danrem 073/Makutarama Kolonel Inf Ari Prasetya didampingi Dandim 0716/Demak Letkol Kav Maryoto serta Sekda H Akhmad Sugiharto dan Kapolres AKBP Ari Cahya Nugraha saat pers rilis pekerjaan fisik TMMD Reguler 123 tahun 2025 di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar.

DEMAK (KR) - TNI Manunggal Mem-bangun Desa (TMMD) kembali dilaksana-kan di wilayah teritorial Kodim 0716/ Demak. TMMD Reguler 123 tahun 2025 yang diagendakan pada 19 Februari - 20 Maret, ditempatkan di Desa Bandungrejo Keca-matan Karanganyar.

Sekda Kabupaten Demak H Akhmad Sugiharto ST MT menyampaikan, TMMD merupakan salah satu bentuk sinergi yang nyata TNI, Pemerintah Daerah dan mas-yarakat. Utamanya dalam percepatan dan pemerataan pembangunan di kawasan pedesaan.

"Pemerataan pembangunan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejah-teraan masyarakat. Terutama di wilayah pedesaan. Melalui TMMD infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, bahkan ru-mah tidak layak huni bisa diperbaiki dalam satu kesempatan. Hingga berujung meng-geliatnya ekonomi daerah," tuturnya, Kamis (20/02/2025).

Melalui interaksi langsung TNI dan masyarakat, menurutnya, mampu me-numbuhkan semangat gotong royong, persatuan dan kesatuan. Sehingga berujung semakin tebalnya semangat bela negara dan stabilitas nasional.

Hal sama disampaikan Komandan

Korem 073/Makutarama Kolonel Inf Ari Prasetya, SE, MHan. Dikatakan, ada dua tujuan utama dilaksanakan TMMD. Selain mendukung program pemerataan pem-bangunan infrastruktur di pedesaan, ke-giatan yang melibatkan banyak komponen itu dimaksudkan pula menumbuhkan lagi gotong-royong.

Menurut Danrem Ari, semangat go-tong-royong yang tumbuh kembali di mas-yarakat, jauh lebih penting dibandingkan hasil pembangunan fisik yang didapat. Sebab menurutnya, membangun infras-truktur jalan bisa dilakukan oleh siapa saja, seperti pengusaha atau ditenderkan.

"Tapi mengumpulkan dan mende-katkan masyarakat dengan TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya dalam satu kesem-patan yang guyub rukun itu tidak mudah. Hampir langka terjadi. Namun melalui TMMD hal itu bisa terwujud," tuturnya, di-dampingi Komandan Kodim 0716/Demak Letkol Kav Maryoto, SE, MM, MSI.

Diungkapkan pula, gotong-royong me-nunjukkan adanya sinergitas, kebersamaan dan persatuan. Saat ini karakter khas mas-yarakat kita ini sudah nyaris punah. Se-mantara di sisi lain, persatuan dan kesa-tuan adalah modal ketahanan negara. ssj

BERDERET RANGKAIAN BUNGA PENUHI PENDAPA SATYA BHAKTI PRAJA
Menyambut Pelantikan Bupati Dan Wabup Demak



KR-Istimewa

Berderet rangkaian bunga memenuhi kawasan Pendapa Satya Bhakti Praja Demak menyambut pelantikan Bupati dan Wabup Demak (2025-2030), dr. Hj. Eisti'anah, SE dan KH. Muhammad Badruddin, M.Pd.

DEMAK - Bupati dan Wakil Bupati Demak periode 2025-2030, dr. Hj. Eisti'anah, SE dan KH. Muhammad Badruddin, M.Pd resmi dilantik, Kamis (20/02/ 2025). Bertempat di Istana Negara Jakarta, pelan-tikan serentak bersama 961 kepala daerah se-Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Doa dan harapan pun dilantikan untuk keselamatan dan kesuksesan kedua pucuk pimpinan birokrasi Pemkab Demak tersebut. Seperti terlihat pada deretan rangkaian bunga yang memenuhi Pendapa Satya Bhakti Praja, menyambut pelantikan Bupati dan Wabup Demak yang baru.

Sebagaimana instruksi Presiden Pra-bowo, agar para kepala daerah yang telah dilantik adalah pelayan dan abdi rakyat. Harus membela kepentingan rakyat, dan berjuang untuk perbaikan hidup rakyat. Maka begitu pula harapan segenap mas-yarakat dan banyak elemen di Kabupaten Demak.

Di antaranya datang dari Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, H Zayinul Fata, SE dan HS Fahrudin Bisri Slamet. Di-sebutkan, ada tiga hal hendaknya diper-hatikan Bupati Eisti'anah di periode kedua kepemimpinannya.

Di bidang kesehatan, diharapkan ada-nya perbaikan layanan, baik di RSUD mau-pun jajaran Puskesmas. Sebab banyak diterima keluhan, masyarakat.masih me-

nunggu lama untuk mendapatkan layanan rawat jalan.

"Setelah ditelusuri, dokternya belum siap di tempat. Tentunya ini menandakan masih kurang profesionalnya SDM di layanan kesehatan," ungkap Ketua DPC PKB Kabupaten Demak itu.

Di bidang pendidikan, disarankan agar peningkatan kualitas pendidikan lebih di-giatkan. Utamanya terkait banyaknya gedung-gedung sekolah negeri yang rusak di pedesaan. Serta persoalan tenaga hono-rer pendidikan yang belum tuntas, meski ada yang telah mengabdikan lebih dari 20 tahun.

Sementara di bidang ekonomi, disaran-kan agar kawasan industri Sayung digeser ke area yang aman dari rob dan abrasi. Se-bab bagaimana satu masuknya investor ke Demak masih sangat dibutuhkan untuk me-ningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, FBS demikian sapaan Fahrudin Bisri Slamet berharap, Bupati dan Wabup yang baru bersinergi menye-lesaikan masalah-masalah di Kabupaten Demak. Ketua DPC PDIP Kabupaten Demak itu optimis, kerjasama yang baik bisa mengatasi aneka persoalan yang dimung-kinan muncul di periode kedua kepemip-inan Bupati Eisti'anah.

"Untuk itu kami siap mengawal per-jalanan mereka dalam berkerja dan meng-abdi untuk masyarakat," tandasnya. ssj.



Wajar Bimantoro
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

BARU-BARU ini pemerintah telah mengeluarkan surat edaran resmi mengenai libur Ramadhan 2025, yang menegaskan bahwa libur bagi pelajar selama bulan suci tidak akan berlangsung sebulan penuh. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama 3 Menteri (SEB 3 Menteri) yang diterbitkan pada Selasa, 21 Januari 2025. Edaran tersebut

"Libur Panjang di Bulan Puasa: Tradisi Ibadah atau Tantangan Pendidikan?"

ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Agama Nasaruddin, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

SEB 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 400.1/320/SJ mengatur jadwal pembelajaran selama bulan Ramadhan 1446 H/2025. Dalam kebijakan tersebut, ditetapkan rincian mengenai jadwal libur Ramadhan, waktu masuk sekolah, serta libur selama perayaan Idul Fitri. Keputusan ini memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak, khususnya tenaga pendidik, orang tua, serta pelajar itu sendiri.

Perdebatan Seputar Banyaknya Libur di Bulan Puasa

Libur panjang selama bulan Ramadhan bagi pelajar telah menjadi tradisi di banyak daerah di Indonesia. Selama

bertahun-tahun, sebagian besar sekolah memberikan waktu libur yang cukup panjang, dengan alasan untuk memberikan kesempatan bagi siswa lebih fokus beribadah. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan permasalahan, terutama dalam efektivitas pembelajaran.

Sejumlah kalangan menilai bahwa libur yang terlalu panjang berpotensi mengurangi produktivitas belajar siswa. Ketua Persatuan Guru Repu-blik Indonesia (PGRI), Nur-kholis, menuturkan bahwa kebiasaan ini dapat berdampak negatif terhadap proses akademik. "Jika siswa libur hampir sebulan penuh, maka banyak materi yang tertinggal. Ini juga dapat mempengaruhi daya serap mereka terhadap pelajaran yang diberikan setelah liburan," ungkapnya.

Selain itu, orang tua murid

juga memiliki pandangan yang beragam. Beberapa orang tua menganggap libur panjang sebagai kesempatan bagi anak-anak mereka untuk lebih mendalami nilai-nilai keaga-maan. Namun, ada pula yang merasa bahwa terlalu banyak libur justru mengganggu ritme belajar anak. "Kami khawatir anak-anak menjadi kurang disiplin dalam belajar jika mereka terlalu lama libur. Sebaiknya sekolah tetap berjalan dengan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel selama bulan puasa," ujar salah satu orang tua siswa di Yogyakarta.

Upaya Pemerintah dalam Menyeimbangkan Pendidikan dan Ibadah

Melalui kebijakan baru ini, pemerintah mencoba menyeimbangkan antara pendidikan dan ibadah selama bulan Ramadhan. Beberapa sekolah di kota-kota besar

sudah mulai menerapkan sis-tem pembelajaran yang lebih fleksibel dengan mengatur jam belajar yang lebih singkat. Model ini dianggap lebih efektif dibandingkan memberikan libur penuh selama satu bulan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan siswa tetap mendapatkan pendidikan yang optimal tanpa mengabaikan kewa-jiban ibadah mereka. "Kami ingin menciptakan sistem pendidikan yang tetap berjalan selama Ramadhan tanpa mengurangi kesempatan siswa untuk beribadah," jelasnya.

Beberapa sekolah juga mulai mengadopsi metode pem-belajaran berbasis daring untuk mengakomodasi kebutuhan siswa selama bulan puasa. Dengan demikian, mereka tetap bisa mengikuti materi pelajaran

tanpa harus hadir di sekolah dalam durasi yang panjang.

Kebijakan mengenai libur Ramadhan bagi pelajar terus menjadi perdebatan setiap tahunnya. Keputusan pemerin-tah untuk tidak memberikan libur penuh selama satu bulan merupakan langkah kompromi agar pelajar tetap mendapat-kan pendidikan yang layak tanpa mengganggu pelaksana-an ibadah mereka. Di satu sisi, libur panjang memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih fokus beribadah, tetapi di sisi lain, pembelajaran yang terlalu lama terhenti bisa berdampak pada efektivitas akademik mereka. Dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, diharapkan kebij-akan ini bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak se-cara lebih adil dan proporsio-nal. Kebijakan pemerintah yang mengatur libur Rama-



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Creative Economy Park

dhan secara lebih proporsional menjadi solusi untuk menyeim-bangkan kedua aspek ini. Adanya sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, diharapkan siswa tetap mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritu-al yang menjadi esensi bulan suci Ramadhan.

Dengan demikian menerap-kan sistem pembelajaran fleksibel, seperti pengurangan jam sekolah atau metode daring, siswa tetap dapat belajar tanpa mengorbankan kesempatan untuk beribadah. Kedepannya langkah ini diharapkan mampu menjaga kualitas pendidikan sekaligus mempertahankan esensi Ramadhan sebagai bulan refleksi dan peningkatan keimanan.***